

DOI: [10.59330/jai.v2i1.16](https://doi.org/10.59330/jai.v2i1.16)

JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Anggrita Putri Kartikaningtyas | Ahim Abdurahim*

AFILIASI:

Program Studi Akuntansi, Universitas,
Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*KORESPONDENSI:

ahim@umy.ac.id.

HISTORI ARTIKEL

Diterima:

20 Juni 2023

Direvisi:

10 Juli 2023

Disetujui:

31 Agustus 2023

Abstrak:

Latar Belakang: Munculnya revisi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua merupakan dasar hukum dari standar yang digunakan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) (Simanjuntak, 2005).

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua.

Metode Penelitian: 100 orang pegawai yang terdiri dari kepala bagian keuangan dan staff keuangan OPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diambil dalam bentuk kuesioner yang mengacu pada skala Likert dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) sebagai alat uji analisis data menggunakan software Smart PLS versi 3.0.

Hasil Penelitian: Sumber daya manusia, komitmen organisasi dan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan SAP berbasis akrua di pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keaslian/Kebaruan Penelitian: Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus pada peran sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi dalam penerapan SAP berbasis akrua.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintah; Sumber Daya Manusia; Komitmen Organisasi; Teknologi Informasi

SITASI: Kartikaningtyas, A.,P. & Abdurahim, A. (2024). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 2(1), 1-12.

Pendahuluan

Adanya reformasi di Indonesia telah merubah sistem ketatanegaraan bangsa hampir secara keseluruhan di setiap aspek kehidupan. Tata pemerintahan yang baik (GCG/*good government governance*) menuntut pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan di segala aspek. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, reformasi keuangan pemerintah menghasilkan paket undang-undang yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan negara yang dituangkan antara lain di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Halim, 2017).

Lahirnya Undang - Undang tersebut menghasilkan Peraturan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan keuangan seperti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi standar yang diterapkan oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan (Simanjuntak, 2005). Dengan adanya SAP berbasis akrual, pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas diakui secara akrual beserta dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBN dan APBD (Pratiwi dkk, 2017). Ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjadi dasar hukum yang kuat untuk penerapan SAP berbasis akrual.

Menurut Indrawati (2018), akuntansi berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui, mencatat, dan menyajikan laporan keuangan segala transaksi ekonomi tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas dan setara kas. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi tolak ukur kualitas laporan keuangan dan keberhasilan pemerintah pusat ataupun daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual (Zalni dkk, 2022). Persiapan secara terstruktur dan kompleks dibutuhkan dan harus diperhatikan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual seperti sumber daya manusia (SDM), komitmen organisasi dan teknologi informasi (Saprudin, 2017). Selain itu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan berbasis akrual dapat dihasilkan dengan komitmen dan integritas yang tinggi.

Untuk bisa menerapkan pencatatan keuangan secara akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan dengan kompetensi yang memadai. Laporan keuangan yang berkualitas dapat dihasilkan oleh pemerintah hanya bila SDM yang bertugas dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, memiliki pemahaman yang memadai terhadap SAP. Dalam islam telah dijelaskan tentang kompetensi sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dalam Al-Qurán Surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِزْ مُسِيْرًا خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِزْتَ الْقَوِيُّ الْإِمِينُ

Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata : “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dipercaya”.

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang pemimpin mencari seseorang yang dapat dipercaya untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Kualitas SDM yang memadai diperlukan dalam praktik penerapan kebijakan publik (Insani, 2010).

Menurut penelitian Sa'diyah dan Yuhertiana (2021) SAP berbasis akrual dipengaruhi secara positif oleh sumber daya manusia. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Putri dan Silviana (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam penelitian Erawati dan Kurniawan (2018) menunjukkan penerapan SAP tidak dipengaruhi oleh SDM. Setiyawati dkk (2018) mengatakan bahwa buruknya kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia secara umum disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan adanya kompetensi SDM yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena SDM menjadi indikator penting bagi kemajuan organisasi serta merupakan faktor yang dapat menentukan bagaimana sebuah kegiatan organisasi mampu berjalan secara efektif.

SDM adalah individu yang memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Putri & Silviana, 2017). Kapasitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses pencapaian tujuan. Hal ini membuktikan bahwa untuk menjalankan suatu sistem, kualitas SDM menjadi peran utama terhadap baik buruknya berjalannya suatu sistem (Sukadana & Mimba, 2015).

Dalam penelitian Safitri (2017) SDM berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selain itu, Putri dan Silviana (2017) menunjukkan bahwa SDM memiliki pengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Dengan adanya kualitas SDM yang tinggi dalam pemahaman SAP, berdampak pada penerapan SAP berbasis akrual yang semakin tinggi dan dapat mempermudah pemerintah dalam mencapai tujuan. Hal tersebut sejalan dengan Teori *Stewardship* di mana potensi dalam sebuah organisasi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal. Mengembangkan hal tersebut, berarti bahwa SDM akan meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Oleh karenanya hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (PSAP).

Komitmen organisasi merupakan bagian terpenting dalam mengembangkan suatu organisasi karena merupakan dorongan internal dari karyawan agar melakukan aktivitas yang sejalan dengan tujuan organisasi dan lebih memprioritaskan kepentingan organisasi dalam rangka menunjang ketercapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan Irfani dkk (2020). Menurut Zalni dkk (2022), komitmen organisasi memiliki kaitan antara karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tempat mereka bekerja yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan. Penelitian Sa'diyah dan Yuhertiana (2021), menyebutkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Putri dan Silviana (2017) bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu, Talitha dan Aswar (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang baik mampu memberikan peningkatan dan mempermudah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Di sisi lain Pratiwi dkk (2017) menemukan kesiapan penerapan SAP tidak dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Hasil yang sama ditemukan oleh Zalni dkk (2022) bahwa komitmen organisasi tidak dapat memberikan pengaruh pada tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Komitmen organisasi yang tinggi seorang pegawai akan memberikan pengaruh positif pada penerapan SAP berbasis akrual menjadi lebih baik. Sejalan dengan Teori *Stewardship* di mana potensi dalam sebuah organisasi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal. Mengembangkan hal tersebut, berarti bahwa dengan adanya komitmen organisasi akan meningkatkan dan mempermudah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

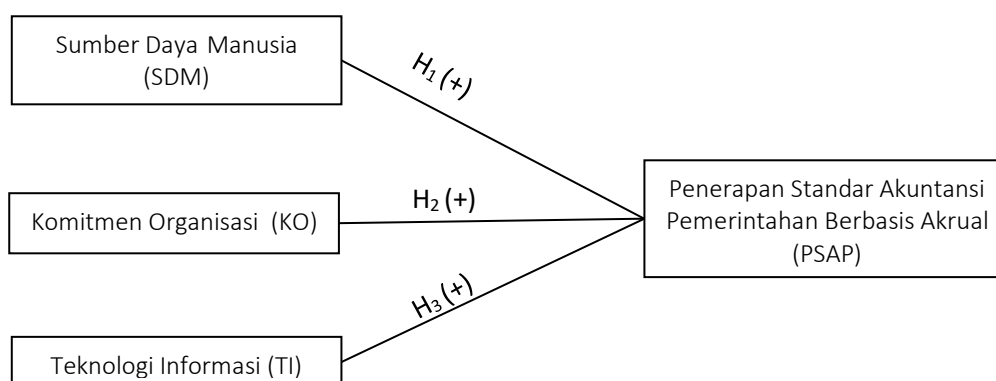
H_2 : Komitmen organisasi (KO) berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (PSAP).

Selain faktor sumber daya manusia dan komitmen organisasi, keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi (Subhi & Yuhertiana, 2021). Teknologi informasi merupakan sebuah alat yang digunakan dalam pengolahan data (mendapatkan, menyiapkan, memproses, menyimpan, dan memanipulasi data) menggunakan beragam cara untuk memberikan informasi yang bermanfaat terhadap pengambilan keputusan (Zalni dkk, 2022). Teknologi informasi terdiri dari tiga indikator, yaitu ketersediaan perangkat perangkat lunak (*software*), keras (*hardware*), dan programmer (*brainware*). Penelitian Pratiwi dkk (2017) menunjukkan bahwa terdapat teknologi informasi mampu memberikan pengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan penelitian Zalni dkk (2022) ada pengaruh positif dan signifikan antara teknologi informasi terhadap tingkat penerapan SAP berbasis akrual. Hal yang sama diungkapkan dalam penelitian Supra (2016) bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Sedangkan dalam penelitian Puspitarini dkk (2017) menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP. Hadirnya perkembangan teknologi informasi, diharapkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat agar mampu memberikan informasi keuangan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan mempermudah penerapan SAP berbasis akrual. Hal tersebut sejalan dengan Teori TAM di mana penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi, serta mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Mengembangkan hal tersebut, berarti bahwa dengan adanya teknologi informasi akan mempermudah organisasi terutama pemerintah daerah dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H_3 : Teknologi informasi (TI) berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (PSAP).

Berdasarkan penurunan hipotesis, model penelitian dapat dilihat pada Gambar 1



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang melibatkan 25 Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (OPD DIY) sebagai populasi penelitian sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 1. 125 kuesioner disebarkan kepada para responden berdasarkan ketentuan sampling yang telah ditentukan yaitu pegawai OPD yang terlibat langsung

dengan keuangan di OPD dalam waktu 2 bulan, dimulai dari 1 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023. Setelah dilakukan pengecekan pada hasil kuesioner yang kembali, hanya ada 100 sampel yang dapat dilakukan pengujian.

Tabel 1 Daftar Sampel Kasubag Keuangan dan Staff Keuangan OPD DIY

Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
Inspektorat	5
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	5
Dinas Kebudayaan	5
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral	5
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5
Dinas Koperasi dan UKM	5
Dinas Kesehatan	5
Dinas Pariwisata	5
Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	5
Dinas Sosial	5
Dinas Perpustakaan Arsip Daerah	5
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	5
Dinas Kelautan dan Perikanan	5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5
Dinas Komunikasi dan Informatika	5
Satuan Polisi Pamong Praja	5
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	5
Badan Kepegawaian Daerah	5
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5
Biro Tata Pemerintahan	5
Biro Umum Humas dan Protokol	5
Total	125

Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan tingkat pendidikan responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan responden adalah S1. Tingkat pendidikan terendah responden adalah Diploma. Terdapat beberapa responden yang tingkat pendidikannya S2. Walaupun hanya berjumlah kecil namun hal tersebut mendandakan bahwa adanya kemajuan pegawai pada pemerintah daerah. Berdasarkan jenis kelamin, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pegawai OPD yang bekerja di bagian keuangan didominasi oleh perempuan dan berdasarkan pengalaman bekerja didominasi oleh mereka yang bekerja selama 1-5 tahun.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah SDM, KO dan TI dengan variabel PSAP sebagai variabel dependennya.

SDM didefinisikan sebagai individu yang memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan (Wibowo, 2007). Variabel ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam mencapai penerapan SAP berbasis akrual yang baik harus memiliki SDM dengan kualitas yang baik. Variabel sumber daya manusia diukur dengan indikator yaitu (1) pemahaman akuntansi; (2) Kualitas SDM; (3) SDM yang memadai, peran dan tanggung jawab, pelatihan keahlian dalam tugas; (4) Sosialisasi peraturan baru dan (5) Tingkat pemahaman struktur organisasi. Pengukuran variabel SDM menggunakan kuesioner berskala *likert* 1-5 dengan mengacu kepada Nasution dkk (2016). Nilai SDM semakin tinggi apabila skor yang dipilih semakin tinggi.

Tabel 2 Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	%
Tingkat Pendidikan		
Tidak mengisi	14	14
Diploma	39	39
S1	40	40
S2	7	7
Jenis Kelamin		
Laki-laki	68	68
Perempuan	32	32
Lama Pengalaman Bekerja		
Tidak Mengisi	0	0
1-5 tahun	69	69
6-10 tahun	16	16
11-20 tahun	10	10
21-25 tahun	0	0
>25 tahun	5	5

KO adalah jenis motivasi yang muncul secara internal agar mau mengerjakan aktivitas yang mendukung keberhasilan tercapainya tujuan organisasi. Indikator variabel yang digunakan dalam komitmen organisasi yaitu (1) komitmen afektif; (2) komitmen berkelanjutan dan (3) komitmen normatif. KO diukur dengan menggunakan skala *likert* 1-5 pada kuesioner. Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat tinggi yang mengacu kepada indikator dalam komitmen menurut Mayer dkk dalam Sopiah (2008).

TI merupakan sebuah alat untuk melakukan pengolahan data (mendapatkan, menyiapkan, memproses, menyimpan, dan memanipulasi data) dengan cara yang beragam untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk pengambilan keputusan (Zalni dkk, 2022). TI dilihat dari tiga indikator, yaitu ketersediaan perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*), dan jaringan (*network*). TI pada penelitian ini diukur dengan menggunakan angket kuesioner skala *likert* 1-5. Semakin tinggi skor menunjukkan TI yang sangat tinggi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada studi (Nasution dkk, 2016).

Setelah data diperoleh, selanjutnya data diolah menggunakan *software SmartPLS, structural equation modeling-partial least square* (SEM-PLS). Data yang telah diolah selanjutnya dilakukan pengujian *inner model* dan *outer model*.

Hasil dan Pembahasan

Uji Outer Model

Dua kriteria yang harus dipenuhi pada saat melakukan analisis data dengan SmartPLS dalam menilai *outer model*, yaitu *discriminant* dan *convergent validity* untuk menentukan validitas dan *composite reliability* untuk menentukan reliabilitas. Data yang diperoleh dilakukan *outlier* pada beberapa indikator pengukur variabel untuk memenuhi uji validitas dan reliabilitas karena memiliki nilai *average variance extracted* (AVE) < 0,5.

Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh item yang digunakan dalam kuesioner adalah valid dengan nilai AVE > 0,5 sebagai syarat *discriminant validity* dan nilai *outer loading* masing-masing item kuesioner > 0,5 – 0,6 sebagai syarat *convergent validity* (Chin, 1998).

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Konvergen dan Diskriminan

Variabel	PSAP	SDM	KO	IT
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP) – AVE: 0,511				
PSAP 1	0,730			
PSAP 2	0,817			
PSAP 3	0,877			
PSAP 4	0,729			
PSAP 5	0,667			
PSAP 7	0,620			
PSAP 8	0,620			
PSAP 9	0,624			
PSAP 10	0,612			
PSAP 11	0,805			
PSAP 12	0,813			
PSAP 13	0,726			
PSAP 15	0,709			
PSAP 16	0,710			
PSAP 17	0,714			
PSAP 18	0,730			
PSAP 19	0,704			
PSAP 20	0,705			
PSAP 21	0,737			
PSAP 22	0,725			
PSAP 23	0,719			
PSAP 24	0,630			
PSAP 25	0,717			
PSAP 26	0,638			
Sumber Daya Manusia (SDM) – AVE: 0,668				
SDM 1		0,756		
SDM 2		0,860		
SDM 3		0,821		
SDM 4		0,761		
SDM 6		0,779		
SDM 7		0,861		
SDM 8		0,728		
SDM 9		0,928		
SDM 10		0,874		
SDM 11		0,785		
SDM 12		0,811		
Komitmen Organisasi (KO) – AVE: 0,550				
KO 1			0,798	
KO 2			0,778	
KO 3			0,727	
KO 4			0,659	
KO 5			0,727	
KO 6			0,608	
KO 8			0,748	

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Konvergen dan Diskriminan (lanjutan)

Variabel	PSAP	SDM	KO	IT
KO 9			0,808	
KO 0			0,795	
Teknologi Informasi (TI) – AVE: 0,718				
TI 1				0,789
TI 2				0,812
TI 3				0,900
TI 4				0,885

Selanjutnya untuk pengukuran reliabilitas suatu konstruk dapat dinilai dengan memperhatikan nilai *Cronbach's Alpha* atau *Composite Reliability*. Nilai *Composite Reliability* harus memiliki nilai $> 0,7$ untuk dapat menilai suatu konstruk dapat dikatakan reliabel. Tabel 4 menunjukkan keseluruhan nilai *composite reliability* memiliki nilai $> 0,7$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kuesioner yang digunakan adalah reliabel.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Composite Reliability
PSAP	0,961
SDM	0,956
KO	0,916
TI	0,901

Uji Inner Model

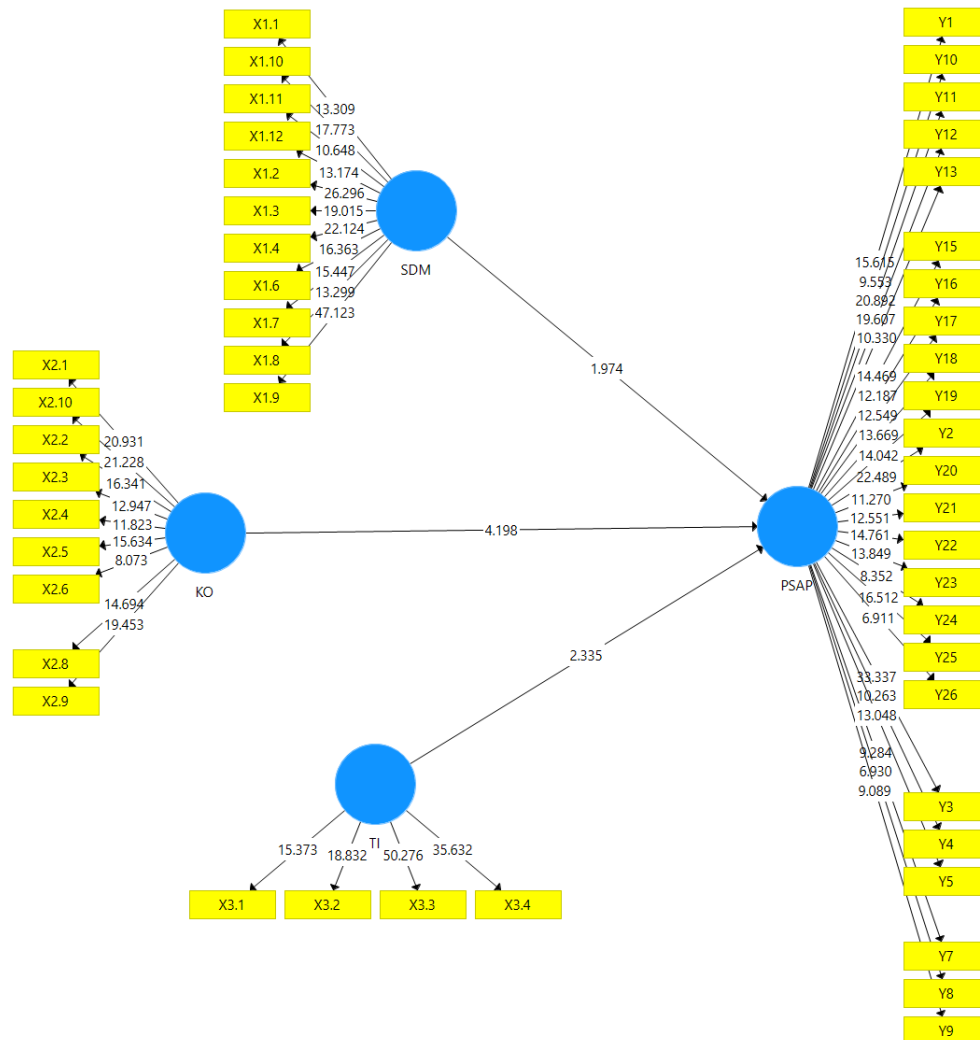
Pada penelitian ini, diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,449 yang menunjukkan bahwa SDM, KO, dan TI berpengaruh terhadap variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 46,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini. Dengan demikian, model tergolong moderat (sedang).

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan ketentuan hipotesis diterima apabila nilai signifikansi *t-values* $> 1,96$ dan atau nilai *p-values* $< 0,05$. Menurut Hair dkk (2013) arah positif atau negatif suatu hipotesis ditentukan oleh nilai *original sample*. Dalam hal ini dilakukan metode *bootstrap* dalam rangka meminimalisir terjadinya masalah data penelitian yang tidak normal. Hasil pengujian dengan *bootstrapping* dari analisis SmartPLS dapat dilihat pada Gambar 2 dan Tabel 5 menyajikan hasil hasil uji hipotesis.

Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KO -> PSAP	0,431	0,437	0,103	4,198	0,000
SDM -> PSAP	0,129	0,134	0,065	1,974	0,049
TI -> PSAP	0,232	0,239	0,099	2,335	0,020

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, KO berpengaruh signifikan positif terhadap PSAP dengan nilai *T statistic* sebesar 4,198 $> 1,96$ dan *p values* bernilai 0,000 $< 0,05$ serta memiliki nilai *original sample* 0,431. Artinya, KO berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang sama terlihat untuk variabel SDM dan TI di mana *T-statistic* masing-masing menunjukkan angka sebesar 1,974 dan 2,335 $> 1,96$ serta nilai *p values* masing-masing yaitu 0,049 dan 0,020 $< 0,05$. Adapun nilai *original sample* masing-masing sebesar 0,129 dan 0,232 menunjukkan bahwa SDM dan TI berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah pada pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini terdukung.



Gambar 2 Hasil Analisis Inner Weight PLS

Peran Sumber Daya Manusia terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akreal

Berdasarkan uji statistic, SDM berperan positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah, maka H_1 terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Talitha dan Aswar (2021) yang menjelaskan bahwa kualitas SDM yang dimiliki oleh pihak yang melakukan pencatatan dan pelaporan laporan keuangan sebuah OPD dapat meningkatkan dan memperlancar penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Selain itu, penelitian Zalni dkk (2022) juga menunjukkan bahwa dengan memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM, akan berdampak pada peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual OPD. Hasil ini juga didukung dengan Putri dan Silviana (2017) yang menunjukkan bahwa OPD yang memiliki SDM dengan kompetensi yang baik akan memiliki imbas yang baik pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

SDM merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Teori *Stewardship* beranggapan bahwa potensi dalam sebuah organisasi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal. Dalam hal ini sejalan dengan Teori *Stewardship* di mana pemanfaatan kualitas SDM yang baik dapat mempermudah pemerintah dalam mencapai tujuan. Maka dapat disimpulkan bahwa SDM yang berkualitas tinggi terutama dalam pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual akan mempengaruhi tingkat PSAP berbasis akrual.

Peran Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan KO berperan positif dan signifikan terhadap PSAP berbasis akrual, maka H₂ terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Silviana (2017) yang menunjukkan bahwa KO berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Artinya bahwa OPD yang memiliki pegawai dengan KO yang tinggi akan mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual menjadi lebih baik sebagaimana hasil penelitian Talitha dan Aswar (2021) yang menemukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan lebih mudah diterapkan dan ditingkatkan ketika pegawai memiliki KO yang baik.

Teori *stewardship* beranggapan bahwa potensi dalam sebuah organisasi diperlukan untuk dapat mencapai tujuan secara maksimal. Dalam hal ini sejalan dengan Teori *stewardship* di mana sebuah OPD yang memiliki pegawai dengan komitmen yang tinggi dapat menjadi pendukung terjadinya perubahan positif terhadap kondisi keuangan walaupun terdapat perubahan dalam peraturan keuangan. Penelitian ini menunjukkan OPD dengan pegawai yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi, akan memberikan efek positif pada penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Peran Teknologi Informasi terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Dari hasil uji statistik TI berperan positif dan signifikan terhadap PSAP berbasis akrual, maka H₃ terdukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dkk (2017) menunjukkan bahwa TI berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian Zalni dkk (2022) membuktikan bahwa tingkat PSAP berbasis akrual OPD dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh TI. Oleh karenanya peningkatan dan perhatian terhadap teknologi informasi dapat meningkatkan PSAP berbasis akrual.

Dalam Teori TAM penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi, serta mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi pada OPD yang tercermin dari ketersediaannya *software*, *hardware*, dan jaringan internet yang mencukupi merupakan penunjang dari penerapan SAP berbasis akrual. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa OPD yang memiliki kualitas teknologi informasi baik dari segi *hardware*, *software* dan *brainware* yang tinggi, akan memiliki imbas pada penerapan SAP berbasis akrual yang lebih baik.

Simpulan

Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi yang baik akan memiliki pengaruh yang lebih baik pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa OPD yang memiliki pegawai dengan komitmen organisasi yang tinggi akan memiliki pengaruh yang lebih baik pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada OPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa OPD yang memiliki kelengkapan teknologi informasi yang memadai dapat mempengaruhi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menjadi lebih baik.

Meski demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama ruang lingkup penelitian yang digunakan tergolong sedikit, hanya mencakup 25 OPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Kedua, data yang dihasilkan hanya diperoleh dari instrumen kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan data dari kuesioner tanpa dilengkapi data pendukung seperti wawancara dan yang lainnya.

Daftar Pustaka

- Chin, W. (1998). The partial least squares approach for structural equation modeling. *Modern methods for business research*, 295–336.
- Erawati, T., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual: kajian dari aspek keperilakuan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 313-332. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i2.1795>
- Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2013). Partial least squares structural equation modeling: Rigorous applications, better results and higher acceptance. *Long range planning*, 46(1-2), 1-12. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2013.01.001>
- Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Sektor Publik. *Saleba Empat*.
- Indrawati, L. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Bandung. *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.35313/eksposisi.v10i1.1005>
- Insani, I. (2010). Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah. *Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bandung*.
- Irfani, M., Pituringsih, E., & Husnan, L. H. (2020). Determinan keberhasilan penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. *e-Jurnal Akuntansi* 30 (6), 1522-1538. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i06.p14>
- Nasution, D. A. D., Erlina, D., & Sari, T. A. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi SAP Berbasis Akrual dengan Komitmen SKPD sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonom*, 19(4), 175-185.
- Pratiwi, A. I., Rahayu, S., & Zutilisna, D. (2017). Teknologi informasi, sumber daya manusia, komitmen dan komunikasi terhadap kesiapan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)* 9(1), 7-11. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i1.363>
- Puspitarini, I., Firmansyah, A., & Handayani, D. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 141-149. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.501>
- Putri, D. U., & Silviana. (2017, Juli 20). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi dan Fungsi Komunikasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Bandung. *Proceedings Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice*, 561-579.
- Sa'diyah, D. I., & Yuhertiana, I. (2021). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Dan Insentif Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Pada Perangkat Daerah Kota Surabaya). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputersisasi Akuntansi*, 14(1), 126-141. <https://doi.org/10.51903/kompak.v14i1.375>
- Safitri, D. (2017). Faktor faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Studi pada skpd pemerintah kabupaten Bengkalis). *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 5(2), 174-189.
- Saprudin, S. (2017). Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 59-69. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12756>
- Setiyawati, H., Iskandar, D., & Basar, Y. S. (2018). The quality of financial reporting through increasing the competence of internal accountants and accrual basis. *International Journal of Economics, Business and Management Studies*, 5(1), 31-39. <https://doi.org/10.20448/802.51.31.39>

- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong era baru akuntansi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1-15.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subhi, G. N., & Yuhertiana, I. (2021). Peran SDM dan teknologi informasi pada penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. *Equity*, 24(2), 141-156. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2468>
- Sukadana, I. C., & Mimba, N. P. S. H. (2015). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(1), 35-49.
- Supra, D. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Kualitas Teknologi Informasi Terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSY: Jurnal Accounting Politeknik Sekayu*, 5(2), 9-23.
- Talitha, V., & Aswar, K. (2021). Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards in Indonesia: A Review of Organizational Factors. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 13(5(J), 22-31. [https://doi.org/10.22610/jebs.v13i5\(J\).3214](https://doi.org/10.22610/jebs.v13i5(J).3214)
- Wibowo. (2007). *Perilaku Dalam Organisasi*. Rajawali Pers
- Zalni, A. P., Monoarfa, R., & Panigoro, N. (2022). Pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (studi kasus pada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Gorontalo). *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 182-195. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v3i2.196>